



Evaluasi Kepemimpinan Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

Evaluation of Sub-District Head Leadership in Village Government Development in South Seluma Sub-District, Seluma Regency

Rahiman Dani¹⁾; Santri Nuver²⁾; Dodo Sutardi²⁾ Henny Aprianty^{*2)}; Hernowo Noviyanto²⁾

^{1,2)} Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

*Email Korespondensi: henny@unihaz.ac.id

How to Cite :

Dani, Ri; Nuver, S; Sutardi, D; Aprianty, H; Noviyanto, H. (2023). Evaluasi Kepemimpinan Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. *SENGKUNI Journal: Social Sciences and Humanities*. 4 (1). 71-80. DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.1.71-80>

ARTICLE HISTORY

Received [18 May 2023]

Revised [28 May 2023]

Accepted [16 June 2023]

KEYWORDS

Evaluation, Leadership, Village Government

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Bupati Kabupaten Seluma Kabupaten Seluma Selatan tentang perkembangan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan dimana data yang diperoleh disajikan dan dideskripsikan atau dideskripsikan dan digunakan sebagai masukan kepada pihak yang berwenang. Alat pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian kami menganalisis Permendagri 2018 nomor 20 untuk mendorong pengelolaan keuangan desa: 1. perencanaan, 2. pelaksanaan, 3. pengelolaan, 4. Pelaporan, 5. Akuntabilitas, Penilaian Kepemimpinan CIPP, Teori (Stufflebeam), Indikator: 1. evaluasi kontekstual, 2. evaluasi masukan, 3. evaluasi proses dan 4. evaluasi produk. Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD Desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau serta Ketua Badan Pengurus Wilayah Administrasi Seluma Selatan. Hasil survey bahwa pembangunan pemerintahan desa di wilayah administrasi seluma selatan oleh direktur kabupaten seluma berhasil.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the description of the Regent of Seluma Regency, South Seluma Regency, regarding the development of village governance. This study uses an approach where the data obtained is presented and described or described and used as input to the authorities. Data collection tools with data collection techniques: Observation, interviews, and documentation. Then we analyze Permendagri 2018 number 20 to encourage village financial management: 1. planning, 2. implementation, 3. management, 4. Reporting, 5. Accountability, CIPP Leadership Assessment, Theory (Stufflebeam), Indicators: 1. contextual

evaluation, 2. input evaluation, 3. process evaluation, and 4. product evaluation. The Village Head, Village Treasurer, and Chair of the BPD of Tangga Batu Village, Padang Genting, Seluma Market, and Padang Merbau as well as Chair of the South Seluma Administrative Body. The survey results show that the development of village government in the South Seluma administrative area by the Seluma District Director was successful.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014, dimana penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, memperkuat kekuasaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan Manfaat daerah untuk meningkatkan daya saing melalui pengenalan. memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keadilan teritorial dan kekhasan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Inventarisasi administrasi negara terdiri dari tugas-tugas administrasi negara yang dilakukan oleh administrasi negara (Supriatna, 2020). Kerajaan/kota membentuk kecamatan untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu, kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, artinya ketika ada kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi kecamatan harus bisa berkoordinasi. segala hal dari administrasi negara. Jika kabupaten berada di luar kabupaten, maka direktur daerah juga harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga mengawasi masyarakat desa/kelurahan (Deswandi, 2016).

Aparatur pemerintah kabupaten membutuhkan seorang pemimpin yang disebut Camat yang dapat menggerakkan bawahannya setiap saat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta berpartisipasi dalam kegiatan administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan secara bermanfaat. Keberhasilan pembangunan akan tercermin dalam produktivitas, kekayaan, dan kesejahteraan yang tinggi. . hal yang sama berlaku untuk seluruh penduduk (Budiman, 1995) .

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena keberhasilan dan kegagalan sangat ditentukan oleh kepemimpinan organisasi tersebut. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kelompok atau organisasi kelembagaan, yang juga dapat diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang (Harbani Pasolong, 2013).

Setelah dana desa diluncurkan pada 2015, jumlahnya mencapai Rp 186 triliun, menurut Kompas. Com (diunduh pada 21 November 2018), penyidik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), memaparkan sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa, dengan kerugian negara sebesar 40,6 miliar rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya (diakses pada 17 November 2018 hingga November 2019). Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ekonomi desa pada semua tingkatan, mulai dari mesin hingga masyarakat, maka harus diketahui konsep dasar tanggung jawab dan transparansi, agar tidak muncul ketidakpedulian dalam pengelolaan ekonomi desa. Penatausahaan keuangan kota diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1. 20, 2018. Pemahaman pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang menjadi tanggung jawab pengelola desa.

Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan perangkat desa dan/atau perangkat daerah setingkat departemen, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sekretaris daerah kepada pejabat yang berwenang/walikota sebagai bahan evaluasi. untuk digunakan. . Kemajuan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat yang digunakan. Pengurus desa terdiri dari : Administrasi umum, administrasi kependudukan dan administrasi keuangan desa (Miftah Thoha, 2012).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang berbunyi: "Keuangan desa dikelola dengan asas terbuka, bertanggung jawab, dan inklusif serta dilakukan secara terkendali dan anggaran. Dengan ketetapan ini, kepala desa memiliki dasar untuk mengatur keuangan desa, dan begitulah adanya." berharap kepala desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik (Arfah & Musin, 2017). Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa dan 20 kecamatan (sumber: Salinan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Seluma).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang evaluasi Kepemimpinan Camat dalam pembangunan pemerintahan desa yang menitikberatkan pada kajian pengelolaan ekonomi desa, dimana tujuan penelitian adalah 4 desa yang mewakili 9 desa dan 3 kecamatan (Andika, 2015). kecamatan di Wilayah Administratif Seluma yaitu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Menurut (Yanto Heryanto, 2021) penilaian pimpinan Camat mengenai perkembangan pemerintahan desa dalam kepemimpinan administrasi keuangan desa dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan, dilakukan penilaian yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penilaian tentang kepemimpinan Camat dalam mendorong pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang berkaitan dengan jenis masalah ini dipelajari menurut sifat hukum yang sebenarnya atau menurut realitas masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian kualitatif ini sebaiknya dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengunjungi subjek dan berkomunikasi dengan informan (Arikunto, 2006).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi survei berada di Desa Padang Merbau, Desa Padang Genting, Desa Tangga Batu, Desa Pasar Seluma dan Kantor Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu. H. dari pertengahan Oktober hingga Desember. 2022.

Instrumen Penelitian

Karakteristik penelitian kualitatif tidak lepas dari observasi partisipan, tetapi peran peneliti menentukan keseluruhan skenario (Lexy J & Moleong, 2010). Alat penelitian atau alat pengumpulan data dalam penelitian adalah peneliti sendiri, yaitu pengembangan alat penelitian sederhana yang bertujuan untuk melengkapi materi dan membandingkannya dengan bahan yang ditemukan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Informan Penelitian (Sumber Data)

Menurut (Lexy J & Moleong, 2010) “Pelapor adalah individu yang biasanya memberikan informasi tentang situasi dan keadaan di balik penyelidikan.” Detektor adalah orang yang mampu memberikan informasi akurat tentang orang lain atau lingkungannya, sedangkan responden adalah orang yang mampu melakukannya.

pengetahuan/informasi nyata tentang diri sendiri (motivasi, ide, perasaan, sikap, tindakan/tugas dan aktivitas nyata). Informan penelitian ini diidentifikasi melalui snowball sampling. Mereka adalah peneliti yang mencari informan lapangan yang terlibat langsung dalam masalah penelitian dan sebelumnya telah mendapat rujukan dari informan sebenarnya. Fokus penelitian ini adalah 4 kepala desa, 4 orang bendahara desa, 4 orang ketua BPD dan 1 orang dari direktur eksekutif kabupaten. Desa-desa tersebut adalah:

1. Padang-Dorf Merbau,
2. Padang Genting Village,
3. Tangga Batu Village kaj
4. Pasar Seluma Village

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Umur
1	Ir. Sarjono	54 Tahun
2	Yuli Ikhwan	46 Tahun
3	Sasyadi, S.E	43 Tahun
4	Hertoni	41 Tahun
5	Neneng Kurniawati, S.E	36 Tahun
6	Rekson Suganda, S.Kom	33 Tahun
7	Eliya	36 Tahun
8	Janiman	39 Tahun
9	Mori Andison	39 Tahun
10	Meizy Zuriyanto, S.Km	28 Tahun
11	Rendra Anggara Putra	27 Tahun
12	Lini Artati	50 tahun
13	Ruly Arisandi, S.IP	44 Tahun

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Sumber data yang relevan berasal dari peneliti. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti dan partisipatif, untuk mengetahui/ mengamati fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terkait dengan Evaluasi Kepemimpinan Camat dalam pembinaan administrasi Keuangan atau dana desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

Tabel 2. Jabatan Informan Penelitian

L/P	Jabatan
L	Kepala Desa Tangga Batu
L	Kepala Desa Padang Genting
L	Kepala Desa Padang Merbau
L	Kepala Desa Tangga Batu
P	Bendahara Desa Tangga Batu
L	Bendahara Desa Padang Genting
P	Bendahara Desa Padang Merbau
L	Bendahara Desa Pasar Seluma
L	Ketua BPD Padang Genting
L	Ketua BPD Padang Genting
L	Ketua BPD Padang Merbau
P	Ketua BPD Pasar Seluma
L	Kasi Pemdes Kecamatan Seluma Selatan

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Arikunto, 2016:126). Peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung perancangan lima desa, terdiri dari kepala desa, bendahara desa, ketua BPD dan toko masyarakat. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur berdasarkan kisi-kisi pertanyaan wawancara untuk pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencari informasi tentang isu atau variabel baru dengan mengumpulkan data tertulis yang sudah ada. Teknik pengumpulan data prasasti dalam catatan, arsip, gambar atau foto pada instansi tertentu pada tempat penelitian dengan tujuan penelitian dan bertujuan untuk menjelaskan atau mendukung proses penelitian.

Uji Keabsahan Data

Validasi data untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diamati dan dipelajari sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan sedang terjadi. Penulis melakukan ini untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disusun akurat untuk pembaca dan peneliti.

Faktor-faktor dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan triangulasi untuk mendapatkan data yang valid. Sementara itu, validasi data mengacu pada teknik yang menggunakan sesuatu selain data untuk melacak atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik audit yang menggunakan sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan. Triangulasi metode tunggal memeriksa beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu. Data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda dan dengan alat yang berbeda dibandingkan dan diperiksa keandalannya.

Dengan menggunakan triangulasi, informasi yang diamati tentang subjek langsung dibandingkan dengan hasil wawancara lapangan antara subjek dan informan. Perbandingan informasi hasil wawancara dengan isi dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan subjek dan informan.

Teknik Analisis Data

Pengumpulan data atau kumpulan data, d. H. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumen, yang kemudian diubah menjadi dokumen tertulis yang dapat dibaca, dikodekan, dan dianalisis.

Reduksi atau reduksi data yaitu penelitian yang melakukan reduksi data melalui seleksi atau pemilihan data yang mengarah pada suatu topik. Menampilkan atau menyajikan informasi, d. H. Menyajikan informasi yang direduksi secara sistematis dalam laporan dengan cara yang mudah dibaca atau dipahami, seluruhnya atau sebagian, dalam konteks satu kesatuan. Penalaran induktif, i. H. proses penarikan kesimpulan dari data berupa laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum penilaian CIPP didasarkan pada evaluasi terhadap kepemimpinan camat dalam membangun pemerintahan desa Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Selatan. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada aspek penelitian diuraikan sebagai berikut:

Camat adalah kepanjangan tangan gubernur yang memimpin administrasi dan memberikan pelayanan sosial di tingkat kecamatan. Secara umum, petunjuk pengelolaan Desa Kamati tertuang dalam Pasal 126 UU tersebut. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 19 Tahun 2008. Dalam kajian ini dibatasi pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Desa. Pasal 126 UU Desa No. 6 Tahun 2004 dan Pasal 2 Perda No. 2.2.19 Tahun 2008 mengatakan: Pemerintahan sementara dan pengendalian pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, bupati juga ikut mengawasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti keputusan kepala desa, agar undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan yang ada. . Penggerak pemerintahan desa sebenarnya adalah pengangkatan pimpinan dewan desa. Pengurus desa terdiri dari :

1. Administrasi umum yang terdiri dari buku administrasi desa, buku peraturan kepala desa, buku barang milik desa, agenda, buku perjalanan, buku perbekalan desa dan buku tanah desa.
2. Pengelolaan kependudukan meliputi: Daftar Penduduk, Daftar Penduduk Sementara, Daftar Perkembangan Penduduk, Daftar Peta Keluarga, Daftar KTP, Daftar Penduduk.
3. Pengurus desa terdiri dari : Buku anggaran desa, buku besar, buku pendukung (Wijaya, 2002: 89). Pengelolaan Keuangan atau Pengelolaan Sumberdaya Desa dalam Kajian Pengembangan Kepemimpinan Kabupaten yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Desain,
 - b. implementasi,
 - c. manajemen, mis. pelaporan, mis. B. Tanggung jawab pelatihan adalah tindakan, proses, hasil, atau laporan perbaikan.

Dalam hal ini berarti maju, memperbaiki, mengubah, mengembangkan cara yang berbeda, mengembangkan atau memperbaiki sesuatu. Konsep pelatihan memiliki dua bagian: pelatihan itu sendiri adalah suatu tindakan, proses atau ekspresi dari suatu tujuan, dan keduanya biasanya berarti "memperbaiki" sesuatu. Dalam implementasinya, evaluasi model CIPP tidak hanya sekedar evaluasi, tetapi mencakup semua aspek (konteks, masukan, proses dan produk), sehingga evaluasi yang akan dilaksanakan bersifat kompleks atau komprehensif. CIPP adalah singkatan dari Skor Konteks, Skor Input, Skor Proses, Skor Produk.

Keempat akronim CIPP tersebut adalah Evaluation Components, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting dari evaluasi bukanlah untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Evaluasi Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahap Perencanaan

Hasil Penelitian ini menunjukkan pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan sudah dilaksanakan oleh Camat, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari adanya Analisis kebutuhan perencanaan, Koordinasi dan kerjasama perencanaan, Pelaksanaan Perencanaan, Penatausahaan perencanaan, pelaporan perencanaan dan penanggungjawaban perencanaan, pembinaan yang di laksanakan Camat secara langsung membina pemerintahan desa ataupun pemerintahan desa ini berkunjung ke kantor Kecamatan Seluma Selatan. Adanya pembinaan camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahanan perencanaan dapat dilihat adanya perencanaan APBDes dan Perencanaan Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau.

Evaluasi perkembangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap implementasi

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan Camat pada pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh Camat, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari adanya Analisis kebutuhan pelaksanaan, Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan dan penanggungjawaban pelaksanaan, pembinaan yang di laksanakan Camat secara langsung membina pemerintahan desa ataupun pemerintahan desa ini berkunjung ke kantor Kecamatan Seluma Selatan. Adanya pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahanan pelaksanaan dapat dilihat adanya pelaksanaan APBDes dan Pelaksanaan Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau.

Evaluasi Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan keuangan Desa Pada Tahap Penatausahaan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan Desa pada tahap Penatausahaan sudah dilaksanakan oleh Camat, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari adanya Analisis kebutuhan Penatausahaan, Koordinasi dan kerjasama Penatausahaan, Pelaksanaan Penatausahaan, pelaporan Penatausahaan dan penanggungjawaban Penatausahaan. Pembinaan yang dilaksanakan Camat secara langsung membina pemerintahan desa ataupun pemerintahan desa ini berkunjung ke kantor Kecamatan Seluma Selatan. Adanya pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahanan Penatausahaan dapat dilihat adanya Penatausahaan APBDes dan Penatausahaan

Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau.

Evaluasi Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan keuangan Desa Pada Tahap Pelaporan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan sudah dilaksanakan oleh Camat, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari adanya Analisis kebutuhan pelaporan, Koordinasi dan kerjasama pelaporan, Pelaksanaan pelaporan, Penatausahaan pelaporan, Pelaksanaan pelaporan dan penanggungjawaban pelaporan, pembinaan yang dilaksanakan Camat secara langsung membina pemerintahan desa ataupun pemerintahan desa ini berkunjung ke kantor Kecamatan Seluma Selatan. Adanya pembinaan camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahan pelaporan dapat dilihat adanya pelaporan APBDes dan pelaporan Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau.

Evaluasi Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan keuangan Desa Pada Tahap Penanggungjawaban

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan Desa pada tahap Penanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh Camat, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari adanya Analisis kebutuhan Penanggungjawaban, Koordinasi dan kerjasama Penanggungjawaban, Pelaksanaan Penanggungjawaban, Penatausahaan Penanggungjawaban, Pelaporan Penanggungjawaban. Pembinaan yang di laksanakan Camat secara langsung membina pemerintahan desa ataupun pemerintahan desa ini berkunjung ke kantor Kecamatan Seluma Selatan. Adanya pembinaan Camat dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap penanggungjawaban dapat dilihat adanya penanggungjawaban APBDes dan penanggungjawaban Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pembinaan camat dalam proses pengelolaan keuangan pemerintahan desa pada tahap Perencanaan sudah dilaksanakan oleh Camat dari adanya Analisis kebutuhan perencanaan, Koordinasi dan kerjasama perencanaan, Pelaksanaan Perencanaan, Penatausahaan perencanaan, pelaporan perencanaan dan penanggungjawaban perencanaan. Evaluasi Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah dilaksanakan oleh Camat, hal ini dapat dilihat adanya pelaksanaan APBDes dan Pelaksanaan Musrembang pada desa Tangga Batu, Padang Genting, Pasar Seluma dan Padang Merbau. Pada Tahap Penatausahaan Pembinaan Camat sudah dilaksanakan dengan bukti yang ada di masing-masing desa. Pada Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban Pembinaan Camat hasilnya dapat dilihat dari pelaporan rutin desa yang selalu dilaksanakan menjelang akhir tahun.

Saran

1. Camat Seluma Selatan hendaknya dapat lebih meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan desa terhadap pemerintahan kepala desa, Bendahara dan ketua BPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan penanggungjawaban sehingga pada pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa dapat desa dapat terealisasi tepat guna dan sasaran yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Camat Seluma Selatan harus dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja dan kepemimpinannya dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/ Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD Sehingga menjadi lebih baik.
3. Kepala desa hendaknya meningkatkan koordinasi dan kerjsamanya dengan Camat kecamatan seluma Selatan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik dan saling bersinergi dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M. (2015). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Di Desa Bandar Tengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai)*. 1(2), 87–100. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/104>
- Arfah, J., & Musin, Y. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Dad) Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe*. 13(02), 91–107.
- Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Budiman, A. (1995). *TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Alumni
- Deswandi, D. (2016). Tugas Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. *Jurnal EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1535–1546. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/10/Doni_Deswandi_\(10-21-16-10-54-12\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/10/Doni_Deswandi_(10-21-16-10-54-12).pdf)
- Harbani Pasolong. (2013). *Kepemimpinan birokrasi*. ALFABETA
- Lexy J, & Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>
- Miftah Thoha. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT.Raja Grafindo Persada
- Supriatna, D. (2020). Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 310–330.

Yanto Heryanto. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa. *Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4789–4804. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.4194>